

**PSAP NO. 01:
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

**PSAP NO. 02:
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**PSAP NO. 07:
AKUNTANSI ASET TETAP**

Mei 2007

**PSAP NO. 01:
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

- Komponen laporan keuangan pokok setidaknya meliputi:
 - Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

- LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- Diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran

- CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK.
- CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

PSAP NO. 02: LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tujuan standar LRA adalah menetapkan dasar-dasar penyajian LRA untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

- LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan
 - (b) Belanja
 - (c) Transfer
 - (d) Surplus (Defisit)
 - (e) Penerimaan Pembiayaan
 - (f) Pengeluaran Pembiayaan
 - (g) Pembiayaan Neto
 - (h) SILPA/SIKPA

- Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam LRA apabila diwajibkan oleh PSAP ini, atau apabila penyajian tsb diperlukan untuk menyajikan LRA wajar.

Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

- Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Bunga
 - Subsidi
 - Hibah
 - Bantuan Sosial
- Belanja Modal
 - Belanja Aset tetap
 - Belanja Aset Lainnya
- Belanja Lain-lain/Tak Terduga

- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Negara/ Daerah
- Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi

- ekonomi (jenis belanja),
- organisasi, dan
- fungsi.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

						(Dalam Rupiah)			
NO.	URAIAN					Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN								
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH								
3		Pendapatan Pajak Daerah				xxx	xxx	xx	xxx
4		Pendapatan Retribusi Daerah				xxx	xxx	xx	xxx
5		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				xxx	xxx	xx	xxx
6		Lain-lain PAD yang sah				xxx	xxx	xx	xxx
7		Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/ d 6)				xxxx	xxxx	xx	xxxx
8									
9	PENDAPATAN TRANSFER								
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN								
11		Dana Bagi Hasil Pajak				xxx	xxx	xx	xxx
12		Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				xxx	xxx	xx	xxx
13		Dana Alokasi Umum				xxx	xxx	xx	xxx
14		Dana Alokasi Khusus				xxx	xxx	xx	xxx
15		Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/ d 14)				xxxx	xxxx	xx	xxxx
16									
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA								
18		Dana Otonomi Khusus				xxx	xxx	xx	xxx
19		Dana Penyesuaian				xxx	xxx	xx	xxx
20		Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/ d 19)				xxxx	xxxx	xx	xxxx
21									
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI								
23		Pendapatan Bagi Hasil Pajak				xxx	xxx	xx	xxx
24		Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				xxx	xxx	xx	xxx
25		Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/ d 24)				xxxx	xxxx	xx	xxxx
26		Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)				xxxxx	xxxxx	xx	xxxxx

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

					(Dalam Rupiah)			
NO.	URAIAN				Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
27								
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH							
29				Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
30				Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
31				Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
32				Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/ d 31)	XXX	XXX	XX	XXX
33				JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
34								
35	BELANJA							
36	BELANJA OPERASI							
37				Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
38				Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
39				Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
40				Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
41				Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
42				Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
43				Jumlah Belanja Operasi (37 s/ d 42)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
44								
45	BELANJA MODAL							
46				Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
47				Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
48				Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
49				Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
50				Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
51				Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
52				Jumlah Belanja Modal (46 s/ d 51)	XXXX	XXXX	XX	XXXX

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/ d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxx	xxx	xx	xxx
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/ d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65					
66	SURPLUS/DEFISIT (33 - 64)	xxx	xxx	xxx	xxx
67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
83	Jumlah Penerimaan (71 s/ d 82)	xxx	xxx	xx	xxx

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
84					
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
86	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
91	Jumlah Pengeluaran (86 s/ d 90)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
92	PEMBIAYAAN NETO (83 - 91)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
93					
94	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)	XXXX	XXXX	XX	XXXX

**PSAP NO. 07:
AKUNTANSI ASET TETAP**

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Termasuk aset tetap pemerintah;
 - Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya Instansi Pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.
 - Hak atas tanah.

- Tanah;
- Peralatan dan mesin;
- Gedung dan bangunan;
- Jalan, irigasi, dan jaringan;
- Aset tetap lainnya; dan
- Konstruksi dalam pengerjaan.

KRITERIA ASET TETAP

- Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

“Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah”

- Aset tetap dicatat dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan, digunakan nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola:
 - biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku), dan
 - biaya tidak langsung (biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang berkenaan)

- Diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh tanpa diketahui nilainya, dicatat dengan nilai wajar
- Biaya perolehan terdiri dari:
harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset yang diperoleh.

- Aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan pada tanggal pelaporan digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.
- Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibangun dan telah siap dipakai direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi adalah pengeluaran yang:

- Memperpanjang masa manfaat
- Meningkatkan kapasitas
- Meningkatkan mutu produksi, atau
- Meningkatkan standar kinerja

PENGUKURAN BERIKUTNYA SETELAH PENGAKUAN AWAL

- Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Penilaian kembali dapat dilakukan jika ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan.

- Aset Infrastruktur merupakan aset tetap.
- Karakteristik Aset Infrastruktur;
 - Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya

Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing aset tetap sbb:

- Dasar penilaian;
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode;
- Informasi penyusutan;
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi;
- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

TERIMA KASIH

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Keuangan
Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta
Telepon/Fax (021) 352 4551,
website : www.ksap.org
Email: webmaster@ksap.org